



## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KUALITAS SDM TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Fredrik Cantona

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [cantonafredrik@gmail.com](mailto:cantonafredrik@gmail.com)

Youdhi Prayogo, S.E., M.E.I

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [youdhiprayogo@uinjambi.ac.id](mailto:youdhiprayogo@uinjambi.ac.id)

Muthmainnah, S.E., M.S.Ak.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [muthmainnah@uinjambi.ac.id](mailto:muthmainnah@uinjambi.ac.id)

Corresponding author : [cantonafredrik@gmail.com](mailto:cantonafredrik@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to determine the influence of accountability, transparency and quality of human resources on APBDes in villages in the Limun sub-district, Sarolangun Regency. This research uses a quantitative approach with primary data in the form of observation results by distributing questionnaires to respondents. The total population in this study was 16 villages located in Limun District, Sarolangun Regency. In this research, the sample used was 11 villages. In 1 village there were 7 respondents, the respondents consisted of: Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Chairman of the Village Consultative Body, Head of Government, Head of Empowerment and Welfare and Head of Development. the total number of respondents was 77 people. In taking samples for this research, the purposive sampling method was used.*

*This research uses multiple linear regression analysis and classical assumption tests. Hypothesis testing was carried out using the correlation coefficient test, coefficient of determination test, T test and F test. The results of this research show that: Accountability has no significant effect on APBDes Management. Transparency has a significant effect on APBDes Management. and the quality of human resources has a significant effect on APBDes management. For the results of simultaneous testing (F test), namely Accountability, Transparency and Quality of Human Resources simultaneously influence APBDes Management. The results of the coefficient of determination ( $R^2$ ) show that the independent variables, namely accountability, transparency and quality of human resources, explain the dependent variable (APBDes management) by 59.4%. the remaining 40.6% was influenced by other variables not examined in this study.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, HR Quality, APBDes Management.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas SDM terhadap APBDes pada Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer berupa hasil observasi dengan menyebarkan kuesioner kepada respondent. Jumlah keseluruhan populasi pada penelitian ini sebanyak 16 Desa yang terletak di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Dalam penelitian ini, sampel yang dipakai berjumlah sebanyak 11 desa. Dalam 1 desa respondent berjumlah 7 orang, respondent terdiri dari: Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kaur pemerintahan, kasi pemberdayaan dan kesjahteraan dan kasi pembangunan. jumlah keseluruhan respondent sebanyak 77 orang. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Metode *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji T dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. dan Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. Untuk hasil pengujian secara simultan (uji F) yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas SDM berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan APBDes. Adapun hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel independent yaitu akuntabilitas, transparansi dan kualitas SDM menjelaskan variabel dependent (pengelolaan APBDes) sebesar 59,4%. sisanya 40,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas SDM, Pengelolaan APBDes.**

## **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 mengenai Keuangan Desa yang mana terdapat pada pasal (1) dan ayat (2) menerangkan tentang Keuangan Desa merupakan dana yang berasal dari APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan untuk desa dengan mentransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kab/kota yang diperuntukkan untuk pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Harapan pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan di pedesaan sehingga dapat dikurangi dengan adanya bantuan keuangan Desa tersebut, pemerintahan Desa dapat melakukan pertimbangan terhadap kebijakan yang tepat yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa itu sendiri.<sup>1</sup> Dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan polemik dan pro kontra diantara masyarakat. Isu-isu tentang otonomi daerah, lebih khususnya Desa dan peraturan yang melingkupinya.<sup>2</sup>

Dengan ini demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dalam peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (BHPR), bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>3</sup> Sumber dari pendapatan Desa tersebut, merupakan alokasi anggaran dari APBN yang merupakan hal yang baru bagi Desa. Kesiapan Desa dituntut agar dapat mengolah Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila Desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan serta penyalagunaan dalam pengelolaan keuangan Desa.<sup>4</sup>

Faktor yang pertama mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban melaporkan dan prinsip pertanggungjawaban publik yang mana proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, harus benar benar dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis

---

<sup>1</sup> Purwati ika, "*Analisis pengelolaan Dana Desa*", Repository Universitas Jambi, 2022:, di akses pada link <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/30806> di akses pada 25 mei 2022: hal 1

<sup>2</sup> Wahjudin Sumpeno, '*Perencanaan-Desa-Terpadu\_edisi-Kedua*' (Banda Aceh, 2004) hal 6

<sup>3</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, '*Pengelolaan Keuangan Desa*' (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) hal 5

<sup>4</sup> Chrisye Mongilala, "*Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa*", Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016: hal 79

akuntabilitas yang berpengaruh pada pengelolaan APBDes sendiri merupakan jenis akuntabilitas publik.<sup>5</sup>

Penerapan akuntabilitas pada pemerintaahan Desa merupakan suatu hal pertanggungjawaban yang dibebankan serta suatu hal yang wajib dilakukan bagi perangkat Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan di Desa baik itu dalam perencanaan maupun dalam melakukan pelaporan keuangannya. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan realiasi APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Yang mana Laporan keuangan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Menurut kepala sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa untuk pelaporan realisasi APBDes di Desa se-kabupaten Sarolangun yang mana hanya melaporkan satu kali dalam satu tahun saja .

Berdasarkan UU no 06 tahun 2014 pasal 103 bahwa laporan realisasi APBDes wajib dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan dan harus tepat waktu. Menurut Ependi, S.E selaku pendaping Desa (pengawas Desa) yang ada di kecamatan limun menyatakan bahwa ada beberapa Desa di Kecamatan Limun yang masih terlambat dalam melakukan laporan keuangan APBDes baik itu laporan semester pertama maupun laporan semester kedua, hal ini diakibatkan kelalaian dari perangkat Desa itu sendiri dalam menyusun laporan realisasi keuangan APBDes.<sup>6</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh Huzairin, S.Pd.I selaku sekretariat Dinas PMD Kabupaten Saerolangun menyatakan bahwa dalam pelaporan APBDes, ada beberapa desa di Kecamatan Limun yang masih melakukan laporan APBDes secara tidak tepat waktu.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat perangkat Desa di kecamatan Limun kurang bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya selaku Aparatur Pemerintah Desa yang mengelola APBDes.

Faktor yang kedua yaitu Transparansi. Transparansi adalah pengelolaannya yang tidak bersifat dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan undang-undang. Agar hak hak masyarakat Desa bisa terpenuhi serta mencegah munculnya konflik yang akan terjadi, maka prinsip transparansi betul-betul dibutuhkan. Pengawasan keuangan Desa bisa dijalankan pihak berwenang bila diimplentasikannya transparansi (Mardiasmo, 2009:18).

Transparansi mutlak dilakukan pemerintahan Desa agar kepercayaan publik dan masyarakat akan penggunaan keuangan Desa (APBDes) menguat. Penerapan tranpransi pada pengelolaan APBDes memang seharusnya dilakukan agar masyarakat Desa mengetahui berapa jumlah anggaran pendapatan dan pengeluaran Desa pada tahun/priode tertentu, penerapan transparansi bisa dilakukan dengan cara memasang sepanduk beleho atau papan informasi tetang keuangan yang mana hal tersebut tertera rincian berapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun/priode yang sudah berjalan. Yang mana hal ini telah di amanatkan dalam Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik dan Undang-undang tahun 2014 tentang Desa. Sementara dari hasil obesrvasi kelapangan pada kantor Desa yang ada di Kecamatan Limun di temukan bahwa hanya beberapa Desa saja yang ada di kecamatan Limun yang menerapkan/memasang sepanduk beleho atau panpan informasi keuangan mengenai APBDes, dijelaskan bahwa dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Limun hanya 2 Desa saja yang memasang sepanduk beleho/papan informasi keuangan APBDes. Dari data tersebut dapat dikatakn bahwa hanya sedikit sekali Desa yang menerapkan keuangan APBDes secara taranparan kepada masyarakat.

---

<sup>5</sup> Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, and Rofika Rofika, 'Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya', *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (28 December 2020): 34–50, <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>. hal 38

<sup>6</sup>Ependi, "Wawancara Pendaping Desa (Pengawas Keuangan Desa) Kecamatan Limun," Pada 09 Mei 2023

<sup>7</sup> Huzairin, "Wawancara sekretariat Dinas PMD Kabupaten Sarolangun," pada 23 juni 2023

Faktor yang terakhir yakni kualitas SDM. Bila menghendaki adanya pengelolaan APBDes yang baik, maka kepala Desa dan perangkat Desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan APBDes diharuskan mempunyai SDM yang berkualitas, yakni dengan ditunjang dengan latar belakang pendidikan akuntansi, kerap menghadiri pelatihan, dan berpengalaman di bidang keuangan. SDM terkait bisa memberi keefektifan dalam menyusun laporan keuangan APBDes, sebab SDM ini sudah paham akan yang harus dikerjakannya dengan seoptimal mungkin yang akhirnya laporan keuangan APBDes bisa terselesaikan tanpa hambatan (Sembiring, 2013:2).<sup>8</sup> Sementara di Kecamatan Limun rata-rata Kepala Desa hanya menempuh pendidikan sebatas tingkatan SMA/SLTA Sederajat dan hanya sedikit yang menempuh pendidikan keperguruan tinggi/S1 yang mana dari 16 Desa di kecamatan Limun hanya terdapat satu Desa saja yang kepala Desa menempuh pendidikan keperguruan tinggi (S1).

Fenomena pengelolaan keuangan Desa menarik untuk di kaji disebabkan dana yang diberikan kepada Desa bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih adanya beberapa Desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan Desa. Disamping itu kurang terbukanya perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat. Serta rendahnya kesadaran dalam hal pelaporan serta pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa sehingga dianggap bukan suatu kewajiban.<sup>9</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Stewardship**

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Donaldson dan Davis (1991), mengasumsikan bahwa teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau kelompok.<sup>10</sup> sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.<sup>11</sup>

### **2. Teori Stakeholder**

*Stakeholder theory* menyatakan bahwa suatu organisasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan organisasinya semata, namun juga harus mampu berkontribusi berupa manfaat kepada para stakeholder-nya (Ghozali & Chariri, 2016).<sup>12</sup>

### **3. Desa**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

---

<sup>8</sup> Mutia Basri, Desti Marianti, and Rofika, 'Pengelolaan Keuangan Desa', hal 38

<sup>9</sup> S. Wahyu Ramadan "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)". (S1 thesis, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hal 3-4

<sup>10</sup> Riny Jefri, 'Teori Stewardship Dan Good Governance'. (Makasar: Jurnal Riset Edisi XXIV, Vol 4, no 003, 2018), hal 22

<sup>11</sup> Agus Wahyudi, 'Village Financial Management Accountability Of Unter Iwes District In Sumbawa Regency', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (25 December 2019), <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i2.447>. hal 42

<sup>12</sup> Hana Citra Putri Nawangsari, 'Apakah Website Desa Sudah Memuat Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa?', *Jurnal Investasi* 7, no. 2 (30 April 2021): 13–21, <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i2.132>, hal 14-15

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

#### **4. Pemerintahan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup> Pemerintahan Desa merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat yang telah ada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

#### **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*Accountability*) dalam konteks administrasi publik senantiasa menarik untuk dikaji, sebab pusat dari administrasi pemerintah justru terletak pada isu-isu skitar akuntabilitas. Menurut Mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018: 100) adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.”<sup>15</sup>

#### **6. Transparansi**

Menurut Ultafiah (2017) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai..

#### **7. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes) yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya yang berkaitan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2).

#### **8. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan Desa. APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Desa yang bersangkutan.<sup>16</sup> Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang terdapat dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, terdapat keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Undang – undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, BAB I Pasal 1

<sup>14</sup>Vina Al Vinatur Rizqiyah, ‘Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendaptan dan belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)’ 8 (2019): hal 3.

<sup>15</sup> Lilis Saidah Napisah and Cecep Taufiqurachman, ‘Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung’, *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)* 6, no. 2 (31 July 2020): 79–88, <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>. ham 81

<sup>16</sup> Muhammad Ari Fahmi and Anies Indah Hariyanti, ‘Soedirman Accounting Review. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2017’ 02 (2017): hal 203–204.

<sup>17</sup> “Ibid”

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Ditinjau dari permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas ( $X_1$ ), Partisipasi ( $X_2$ ), dan Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_3$ ). Maksud Penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) di Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Adapun Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Desa yang berada di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Sementara waktu dilakukannya penelitian ini ialah pada tahun 2023

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Data Primer. Data primer biasanya didapat dari subyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan, interviu/wawancara ataupun pengisian kuesioner secara langsung atau secara tidak langsung melalui aplikasi kuesioner seperti Google Form, ArcGIS, dan lain-lain. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui observasi/pengamatan langsung, subyek diberi lembar yang berisikan pertanyaan untuk diisi, pertanyaan yang ditujukan untuk responden.<sup>18</sup> **Populasi Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa yang berada di Kecamatan Limun yang berjumlah 16 Desa yang mengacu pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dijadikan subyek penelitian.<sup>20</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 11 Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dalam hal ini berjumlah 77 sampel responden.

### **Metode Penarikan Sampel**

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menentukan pertimbangan tertentu<sup>21</sup> dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Keuangan), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kasi pemerintahan, Kaur Umum, kasi pelayanan dan kesejahteraan.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>18</sup> Titin Agustin Ningsi, Bella Arisha & Yuliana Safitri, ' *Statistika Deskriptif Dengan Program R*, (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022), hal 16

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati* (Bandung: Alfabeta, 2019) hal 130

<sup>20</sup> Titin Agustin Ningsi, Bella Arisha & Yuliana Safitri, (2022), 19

<sup>21</sup> Sugiyono (2019). hal 138

**1. Analisis Deskriptif Responden**

Penelitian ini menerapkan penelitian dengan menggunakan data primer yang mana data di ambil melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 77 kuesioner, dan kusioner yang disebarakan semuanya kembali.

**Tabel 4. 1**  
**Distribusi Sebaran Kusioner**

keterangan	jumlah	presentase
Kusioner yang disebar	77	100%
Kusioner yang kembali	77	100%
Kusioner yang tidak kembali	-	0%
Jumlah kusioner yang dapat diolah	77	100%

Sumber : Data primer di olah, 2023

Setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk perlu dilakukannya pengelompokan terhadap jenis responden dengan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini Responden berjumlah sebanyak 77 orang. Pada penelitian ini karakteristik yang digunakan yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan lama pengalaman bekerja yang didapatkan dari data hasil secara langsung dari responden melalui kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

**Tabel 4. 2**  
**Karakteristik Respondent**

Kriteria Reponden	Kategori	Jumlah (Presentase)	Total (Presentase)
Jenis Kelamin :	• Laki-laki	66 (85,7%)	77 (100%)
	• Perempuan	11 (14,3%)	
Usia :	• 21-30 Tahun	8 (10,4%)	77 (100%)
	• 31-40 Tahun	13 (18,2%)	
	• 41-50 Tahun	30 (39,0%)	
	• 51-60 Tahun	25 (32,5%)	
Tingkat Pendidikan :	• S2	1 (1,3%)	77 (100%)
	• S1	20 (26,0%)	
	• D3	1 (1,3%)	
	• SLTA/Sederajat	55 (71,4%)	
Lama Pengalaman Kerja :	• 1-3 Tahun	64 (83,1%)	77 (100%)
	• 4-6 Tahun	6 (7,8%)	
	• > 6 Tahun	7 (9,1%)	

Sumber : Data primer di olah, 2023

**2. Hasil Uji Kualitas Data**

**a. Uji Validitas**

Uji validitas mengindikasikan kecermatan dan ketepatan kuesioner. Agar bisa mengidentifikasi kevaliditasan dari setiap variabel, maka r hitung dieperbandingkan dengan r tabel, dan r tabel penghitungannya dengan  $df = N - 2$ . Jumlah respondennya yaitu 77, maka  $df = 77 - 2 = 75$ ,  $r(0,05;75) = 0,2242$ . Bila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan yang digunakan tergolong valid.

**Tabel 4. 3 Karakteristik Respondent**

Variabel	Jumlah Pernyataan	$R_{hitung}$ Setiap pernyataan	$R_{tabel}$ Setiap pernyataan	Keterangan Setiap pernyataan
Akuntabilitas (X1)	6	> 0,2242	0,2242	Valid
Transparansi (X2)	8	> 0,2242	0,2242	Valid
Kualitas SDM (X3)	12	> 0,2242	0,2242	Valid
Pengelolaan APBDes (Y)	23	> 0,2242	0,2242	Valid

Sumber : Data primer di olah, 2023

**a. Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/ pernyataan yang digunakan, Uji reabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/ taraf signifikan yang digunakan lebih besar dari 0,60 maka dikatakan realibel.

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Nilai Batas	Keterangan
Akuntabilitas	0,844	0,60	Realibel
Transparansi	0,626	0,60	Realibel
Kualitas SDM	0,893	0,60	Realibel
Pengelolaan APBDes	0,921	0,60	Realibel

Sumber : Data primer di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai *Cronbach's alpha* pada variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai 0,844, Transparansi 0,626, Kualitas Sumber Daya Manusia 0,893 dan Pengelolaan APBDes 0,921. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuisisioner penelitian realibel karena nilai *Cronbach's alpha* diatas lebih besar dari 0,60

**b. Uji Regresi Linier Berganda.**

Regresi Linear Berganda merupakan Metode untuk menguji hipotesis dan menganalisis data adalah dengan menggunakan *Multiple Linear Regression* (Regresi Linear Berganda) dari program SPSS. Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu.

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	1,406
1 TotalX <sub>1</sub>	.102
TotalX <sub>2</sub>	1.714
TotalX <sub>3</sub>	.732

Sumber : Data primer di oleh, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui hasil dari uji regresi linier berganda di peroleh sebagai berikut :

$$Y = 1,406 + 0,102 X_1 + 1,714 X_2 + 0,732 X_3$$

1. Nilai koefisien konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 1,406 dengan nilai positif, ini dapat di artikan bahwa dengan adanya variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ), Transparansi ( $X_2$ ), dan Kualitas SDM ( $X_3$ ), Pengelolaan APBDes ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 1,406.
2. Nilai koefisien beta variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 0,102, jika nilai variabel lain konstan dan variabel  $X_1$  mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pengelolaan APBDes ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,102.
3. nilai koefisien beta variabel Tranparansi ( $X_2$ ) sebesar 1,714, jika nilai variabel lain konstan dan variabel  $X_2$  mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pengelolaan APBDes ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 1,714.
4. Nilai koefisien beta variabel Kualitas SDM ( $X_3$ ) sebesar 0,732, jika nilai variabel lain konstan dan variabel  $X_3$  mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pengelolaan APBDes ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,732.

**c. Uji Asumsi Klasik**

1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *statistik klmogorov-smirnov* dengan SPSS Versi 20 kriteria yng digunakan adalah melalui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed > 0,05*, maka distribusi data tersebut normal.

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Normalitas**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	77

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.09337559
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		1.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.199

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS V.20 di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12, hasil dari uji normalitas dengan melakukan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan yaitu sebesar 1,99. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data-data variabel yang digunakan telah memenuhi distribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independent. Uji Multikolinieritas adalah sebagai berikut: Jika nilai *Tolerance* variabel lebih besar dari (>) 0,01 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari (<) 10, maka tidak terjadi Multikolinieritas, Jika nilai *Tolerance* variabel lebih kecil dari (<) 0,01 dan nilai VIF lebih besar dari (>) 10, maka terjadi Multikolinieritas.

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.406	10.470		.134	.894		
1 X1	.102	.285	.032	.356	.723	.695	1.439
X2	1.746	.363	.444	4.807	.000	.651	1.537
X3	.732	.120	.507	6.109	.000	.806	1.241

a. Dependent Variable: Y

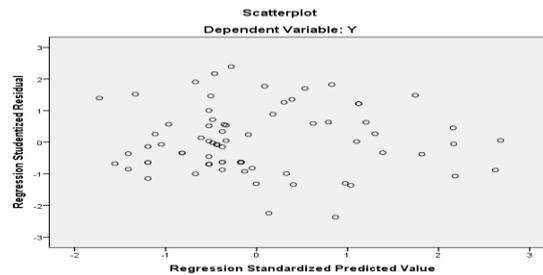
Sumber: Output SPSS V.20 di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki *tolerance* lebih besar dari (>) 0,01. Dimana variabel akuntabilitas (X<sub>1</sub>) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,695 dengan nilai VIF lebih kecil dari (<) 10 yaitu sebesar 1,439. Kemudian untuk variabel transparansi (X<sub>2</sub>) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,651 dengan nilai VIF lebih kecil dari (<) 10 yaitu sebesar 1,537 dan untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X<sub>3</sub>) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,806 dan nilai VIF lebih kecil dari (<) 10 yaitu sebesar 1,243. maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji multikolinieritas pada tabel diatas tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana *variance* dari residual adalah tidak sama antara satu observer (pengamatan) dengan pengamatan lainnya. Jika ada pola tertentu, seperti titi-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (Bergelombang, melebar kemaudian menyempit) maka terjadi Heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas seperti titi-titik yang menyebar keatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak Heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1.4 Berikut:

**Gambar 1. 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Output SPSS V.20 di olah, 2023

Berdasarkan gambar 1.4 diatas hasil uji heteroskedastisitasdiatas menunjukkan bahwa titik-titik terlihat menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan gambar grafik tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada gambar diatas.

### 3. Uji Hipotesis

#### 1. Uji R (Koefisien Korelasi)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linier variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. (Kuncoro 2013:240). Koefisien korelasi (R) memiliki nilai antara -1.00 hingga 1.00. Semakin R mendekati angka 1.00 maka dapat diartikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif dan juga sebaliknya.

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.771 <sup>a</sup>	.595	.578	4.177	.595	35.766	3	73	.000

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui nilai *sig. F change* yang di hasilkan yaitu sebesar 0,00 lebih kecil dari (>) 0,05 dan nilai dari R yang di hasilkan yaitu Sebesar 0,771. Nilai koefesien korelasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas SDM berkorelasi kuat dengan variabel Pengelolaan APBDes. Maka dapat dikatan bahwa hubungan antara variabel dependent dengan varibel independent berkorelasi secara signifikan.

#### 2. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Uji R<sup>2</sup> untuk melihat kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel devenden. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

**Tabel 4. 16**  
**Hasil Uji Koefesien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 <sup>a</sup>	.595	.578	4.177	1.920

a. Predictors: (Constant), Kualitas SDM (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)

b. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes (Y)

Sumber : Output SPSS V.20 di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui Nilai Adj R Squar Sebesar 0,594 atau 59,4%. Nilai koefesien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X<sub>1</sub>),

Transparansi (X<sub>2</sub>), dan Kualitas SDM (X<sub>3</sub>) mampu menjelaskan variabel Pengelolaan APBDes (Y) sebesar 59,4% sedangkan sisanya yaitu 40,6% dijelaskan oleh variabel lain.

3. Uji F (*Uji Simultan*)

Uji Simultan (Uji F) merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independent secara bersama-sama (simultan) berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependent dengan membandingkan nilai F yaitu 0,05 jika tingkat signifikan F < 0,05 maka dapat diartikan variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependent begitupun sebaliknya.

**Tabel 4. 17**

**Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1871.734	3	623.911	35.766	.000 <sup>b</sup>
Residual	1273.435	73	17.444		
Total	3145.169	76			

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas SDM (X<sub>3</sub>), Akuntabilitas (X<sub>1</sub>), Transparansi (X<sub>2</sub>)

Sumber : Output SPSS V.20 di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil uji F<sub>hitung</sub> yaitu 35,766 lebih besar dari F<sub>tabel</sub> yaitu 0,2730 sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang mana < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas SDM Berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pengelolaan APBDes..

4. Uji T (*Uji Singnifikan Parsial*)

Uji t merupakan pengujian seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau dependent secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dengan melihat nilai signifikan pada tabel *Coefficient*. Dengan tingkat signifikan dari uji t yaitu 0,05 jika tingkat signifikan T lebih kecil dari (<) 0,05 dapat diartikan variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent begitupun sebaliknya. Uji parsial dapat dinilai dengan membandingkan nilai t<sub>hitung</sub> dan nilai t<sub>tabel</sub>.

**Tabel 4. 18**

**Hasil Uji T**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.406	10.470		.134	.894
Akuntabilitas (X <sub>1</sub> )	.102	.285	.032	.356	.723
Transparansi (X <sub>2</sub> )	1.746	.363	.444	4.807	.000
Kualitas SDM (X <sub>3</sub> )	.732	.120	.507	6.109	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes (Y)

Sumber : Output SPSS V.20 di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil uji parsial nilai T<sub>tabel</sub> yaitu sebesar 1,665 jika nilai signifikan jika tingkat signifikan T lebih kecil dari (<) 0,05 maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Berikut Penjelasan hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

- a. Nilai thitung variabel Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) sebesar 0,356 lebih kecil dari (<) nilai ttabel yaitu 1,665 dan nilai sig. yaitu 0,723 lebih besar dari (>) 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel Akuntabilitas Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes.

- b. Nilai thitung variabel Transparansi ( $X_2$ ) sebesar 4,773 lebih besar dari ( $>$ ) nilai ttabel yaitu 1,665 dan nilai sig. yaitu 0,000 lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05, maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes.
- c. Nilai thitung variabel Kualitas SDM ( $X_3$ ) sebesar 6,109 lebih besar dari ( $>$ ) nilai ttabel yaitu 1,665 dan nilai sig. yaitu 0,000 lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05, maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya variabel kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berdasarkan tabel 4.18, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Thitung yang dihasilkan yaitu sebesar 0,356 lebih kecil dari ( $<$ ) nilai Ttabel 1,665 yang ditentukan dan nilai signifikan 0,723 lebih besar dari ( $>$ ) 0,05. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka  $H_{o1}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak yang artinya variable Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam penelitian sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Triyono et al., 2018). dan penelitian (sangki, 2020) Akan tetapi berbeda pada penelitian (Abdul latif, 2021), (handayani jika saputra, 2022) dan (Yesi mutia basril, 2021) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Desa.

### **2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berdasarkan tabel 4.18, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Thitung yang dihasilkan yaitu sebesar 4,773 lebih besar dari ( $>$ ) nilai Ttabel 1,665 yang ditentukan dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{o2}$  ditolak yang artinya variable Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan (Abdul latif, 2021), dan (Yesi mutia basril, 2021) Namun berbeda dengan penelitian (Reka gustina ningsi, 2021) yang menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap dana desa.

### **3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berdasarkan tabel 4.18, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Thitung yang dihasilkan yaitu sebesar 6,109 lebih bear dari ( $<$ ) dari nilai Ttabel 1,665 yang ditentukan dan nilai signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak yang artinya variable Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Abdul latif, 2021)<sup>22</sup> dan (Yesi mutia basril, (2020)<sup>23</sup> yakni varibel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

### **4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berdasarkan tabel 4.17, menunjukkan bahwa hasil uji Fhitung yaitu 35,766 lebih besar dari ( $>$ ) Ftabel yaitu 0,2730 sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,000 lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas SDM berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat secara simultan dapat mendorong dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semakin baik.

---

<sup>22</sup> Latif And and Savitri, (2021). Hlm 190

<sup>23</sup> Mutia Basri, Desti Marianti, and Rofika (2020). Hlm

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun). Maka telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes di Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Karna akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah desa. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun penerapan Akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes pada Desa yang ada di kecamatan limun belum sepenuhnya di lakukan oleh perangkat Desa. Hal ini terjadi karna kurangnya pertanggungjawaban serta pengetahuan dari perangkat desa itu sendiri selaku pengelola APBDes.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui Hipotesis kedua yaitu Transparansi mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Pengelolaan APBDes di Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui Hipotesis ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia mempengaruhi secara signifikan terhadap variable Pengelolaan APBDes di Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
4. Berdasarkan hasil uji F (variabel independent) Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap variable dependent (Pengeolaan APBDes) di Desa Se-kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan serta kesimpulan, maka dapat diberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan penerapan Akuntabilitas dalam Penegelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan akhir yang harus dilakukan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini yang mungkin punya pengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dapat menambah jumlah sampel yang akan diteliti serta memperluas ruang lingkup penelitiannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Sumber**

#### **Al-qur'an:**

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an TerSjemahannya (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018)

#### **Jurnal, Tesis, skripsi:**

[2] Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, And Josef Kairupan, '*Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa* (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)', n.d., 12.

[3] Abdul Latif and Enni Savitri, '*The Effect Of Accountability, Transparency And Quality Of Human Resource On Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra)*', *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 2 (2021): 10.

*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

- [4] Agus Wahyudi, 'Village Financial Management Accountability Of Unter Iwes District In Sumbawa Regency', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (25 December 2019), <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i2.447>.
- [5] Chrisye Mongilala, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa", *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016:Hlm 79
- Daling, M, *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*.Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2013.. Di akses pada link <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1942/1539> pada tanggal 29 agustus 2022
- [6] Ferdy Leuhery, 'Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja, Dan Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku' *Jurnal SOSOQ: Volume 6 Nomor 1, Februari 2018*.
- [7] Hartina, Suyitno, I., & Mustari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Lembang Kohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 2017)*
- [8] Handayani Jaka Saputra, 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Kampung Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKampung)', 2022, 16.
- [9] Kristini dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 23 No. 2, Agustus 2020
- [10] Latif And and Savitri, 'The Effect Of Accountability, Transparency And Quality Of Human Resource On Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra)'
- [11] Munawaroh, Ika, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)" (di Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. S1 thesis, Akuntansi, 2022).
- [12] Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, "Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)" (Skripsi -Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014),
- [13] Muhammad Ari Fahmi and Anies Indah Hariyanti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)* 'Soedirman Accounting Review. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2017' 02 (2017): 24.
- [14] Ningsih, Afriyanti, Juana, "Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung) 2021.
- [15] Titin Agustin Ningsi, Bella Arisha & Yuliana Safitri, 'Statistika Deskriptif Dengan Program R, (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022)